

# Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan *versus* Keindonesian pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau<sup>1</sup>

Syafuan Rozi

## Abstract

*Ethnicity problem has been flaming the Indonesian political dynamics due to conflictual point of views between multiethnic and state position since Indonesian independence. This problem is still unfinished. Every region with its ethnicities expresses high demand of their symbolic, political representative, fair economic allocation and distribution of resources. This article examines ethnicity problems in Aceh, Papua, Bali and Riau. In Aceh and Papua cases, coercive approach is used to achieve prosperity, while Bali and Riau tend to use symbolic and persuasive approach like Melayu people congress and Ajeg Bali—rising cores values—to achieve fairness, justice and sustainability. This has been an on going process of rethinking and re-evaluating of a biggest project of 'Indonesianess' (Keindonesiaan) in a new way.*

## PENDAHULUAN

Berbagai upaya menuntut keterwakilan politik dan alokasi ekonomi yang adil, menggambarkan kondisi problematika keetnisan dalam keindonesiaan yang di beberapa daerah menuntut keseimbangan baru. Terdapat sebuah situasi yang seolah membenarkan tesis yang meyakini bahwa potensi menguatnya identitas primordial tetap besar selepas masuknya sebuah negara ke era kemerdekaan. Tidak proporsionalnya keterwakilan etnis dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor pemicu kebangkitan sentimen etnis.<sup>2</sup> Hal mana tecermin misalnya dengan adanya isu “Jawa–non Jawa”, di samping faktor lain seperti kemunduran ekonomi, pertarungan ideologis, maupun kepentingan elit lokal turut pula menjadi faktor determinan yang mencuatkan sentimen keetnisan.

Itu kerap kali berkelindan dengan sentimen keagamaan dan kedaerahan, terkait soal

keterwakilan politik dan distribusi serta alokasi sumber-sumber yang langka, maupun berhubungan dengan posisi kekuasaan, jabatan, kepemilikan, mata pencarian, dan harga diri. Situasi ini secara umum bersesuaian dengan tesis Clifford Geertz yang menyebutkan bahwa potensi menguatnya identitas primordial cenderung akan tetap besar selepas masuknya sebuah negara ke era kemerdekaan.<sup>3</sup>

Beragam ekspresi yang diperlihatkan oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah, sebagai wujud pengukuhan eksistensi diri dan sekaligus, dalam batas tertentu, refleksi dari penentangan terhadap konsep rasa senasib atas nama kesejarahan dan komitmen cita-cita ke depan sebagai sebuah bangsa, menunjukkan bahwa fenomena kebangkitan primordialisme berwujud sentimen keetnisan yang mengarah pada upaya kemandirian total atau bahkan pemisahan diri bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dalam upaya pembangunan bangsa dan keindonesiaan.

Dalam konteks ini, munculnya tuntutan pemisahan diri yang pernah disuarakan sebagian kelompok masyarakat di Aceh dapat dibaca sebagai ekspresi dari penolakan terhadap keindonesiaan. Ekspresi penolakan yang

<sup>1</sup> Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan Firman Noor, M.A. (koordinator), Irine Hiraswari Gayatri, M.A; Muridan S. Widjojo, Ph.D., Syafuan Rozi Soebhan, M.Si., dan Prof. Dr. Mochtar Pabottingi.

<sup>2</sup> Cliford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 273–277.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 269–270.

dimaksudkan berada dalam ruang hubungan yang kontradiktif antara tradisionalisme dan modernisme, yang mengaitkan sejarah di masa lampau ke dalam kehidupan masa kini, seperti diungkapkan dalam isi manifesto ASNLF (*Atjeh Sumatra National Liberation Front*) 1976, ‘*an archetypical modernist claim for a primordial past*’.<sup>4</sup> Kajian literatur memperlihatkan Aceh dua kali menjadi lokus dari pola resistansi berbasiskan identitas.

Pertama terjadi di tahun 1953 ketika Pemerintah RI mengabaikan aspirasi kultural yakni keinginan pelaksanaan syariat Islam yang memunculkan perlawanan dari Daud Bereueuh. Namun, alih-alih memenuhi atribut “daerah Istimewa”, Indonesia yang sentralistik di bawah Orde Baru menggiatkan pembangunan dengan metode penyebaran dan penguatan keindonesiaan di Serambi Mekah melalui proses yang militeristik dan koruptif. Situasi tersebut oleh sebagian masyarakat Aceh dipandang sebagai proses “Jawanisasi” atau bahkan “sekularisasi”, yang secara struktural memberlakukan proyek-proyek besar di Aceh sebagai “daerah modal” yang sebagian besar hasilnya masuk ke pemerintah pusat.<sup>5</sup>

Sebagai dampaknya, sebagian besar rakyat Aceh masih hidup dalam garis kemiskinan, dan lebih dari itu memunculkan kesadaran akan demikian seriusnya kebuntuan penyaluran aspirasi dan kepentingan di segenap aspek kehidupan. Situasi inilah yang memfasilitasi inisiatif sebagian kelompok masyarakat Aceh untuk membentuk organisasi berbasiskan solidaritas etnis yang merasakan sependeritaan (*shared suffering*). Tuntutan pemisahan diri yang muncul kemudian dihadapi oleh pemerintah melalui penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) hingga Darurat Militer di Aceh semenjak 1988 hingga 1998 sehingga makin menguatkan munculnya sentimen keetnisan di Aceh yang ruangnya terbuka lebar setelah kejatuhan Soeharto di tahun 1998. Siklus kekerasan yang muncul membuat Aceh, yang dikenal sebagai

‘Serambi Mekkah’<sup>6</sup>, oleh ilmuwan Anthony Reid kemudian dijulukinya sebagai ‘*verandah of violence*’ serambi kekerasan.

Sementara itu, sebagaimana di Aceh, menguatnya sentimen keetnisan juga meluas di Papua. Dikaitkan dengan aspek sejarah, kesadaran itu telah diwujudkan dengan upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bagi sebagian rakyat Papua, opsi untuk merdeka merupakan tujuan yang tidak bisa ditawar lagi. Edward Aspinall dan M.T Berger misalnya,<sup>7</sup> meyakini bahwa faktor internal, yakni cara pemerintahan Soeharto memperlakukan masyarakat Papua dan faktor eksternal berupa persepsi dunia internasional terhadap eksistensi kelompok minoritas dalam sebuah negara, memainkan peran yang penting. Keduanya meyakini bahwa penonjolan sifat pemaksaan dan kekerasan oleh pemerintah pusat, terutama di masa Orde Baru itu, sesungguhnya makin memperkuat sentimen primordial di tingkat lokal. Selain itu, faktor eksternal, terutama pascaruntuhnya komunis, cukup memberi angin segar bagi gerakan separatis, mengingat kecenderungan negara-negara besar untuk lebih menghargai hak-hak kalangan *indigenous*.

Pelajaran yang dapat diambil dari perspektif yang disampaikan oleh Aspinall dan Berger adalah diseminasi nasionalisme melalui pendekatan keamanan, jelas bukan merupakan sebuah langkah yang tepat dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengembalikan rasa percaya sebagai satu bangsa di Tanah Papua, dan juga Aceh. Akademisi Denny J.A.<sup>8</sup> menganalisis bahwa ketimpangan ekonomi, kekhasan etnis, kesejarahan, dan eksplorasi sumber daya alam memainkan peran yang tidak sedikit dalam

<sup>4</sup> Paul James, “Theorizing Nation Formation in the Context of Imperialism and Globalism”, dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar, *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, (London: Sage Publications, 2007), hlm. 371–372.

<sup>5</sup> Lihat, Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989–1992*, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1995).

<sup>6</sup> Istilah “Serambi Mekkah” ditemukan dalam karya Snouck tahun 1906 yang menggambarkan Aceh sebagai pintu gerbang ke Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Baca, Snouck Hurgronje, *The Atjehers*, (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 19. Namun, pertama kali pemakaian Aceh dan Mekkah dikemukakan dalam karya sastrawan Nur al-Din-al-Raniri *Bustan al-Salatin* di tahun 1641 yang menyebut Aceh sebagai “Mekkah dari Timur”. Baca, Peter G. Riddell, “Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: *Serambi Mekkah* and Identity”, dalam Anthony Reid, ed., *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (Singapore: Singapore University Press, 2006), hlm. 38–39.

<sup>7</sup> E. Aspinall and M.T Berger, “The Break Up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-State in Post-Cold War Southeast Asia”, *Third World Quarterly*, 22 (6), 2001, pp. 139–169.

<sup>8</sup> Denny J.A., “Membelah Politik Papua”, dalam *SP Daily*, 2 September 2003.

menguatkan aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka. Meskipun kekhasan etnis bukan sesuatu yang benar-benar membedakan rakyat Papua dengan masyarakat Indonesia di belahan Timur, namun isyarat Denny bahwa kebangkitan sentimen keetnisan terkait dengan perasaan tertindas dalam makna yang meluas, tidak saja dalam konteks ekonomi dan politik namun juga dalam persoalan jati diri keetnisan, merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan konteks yang melatar kebangkitan primordialisme etnis di dua provinsi di atas, persoalan struktural terutama ketimpangan ekonomi,<sup>9</sup> memainkan peranan penting dalam menyadarkan masyarakat Riau tentang identitas mereka. Kemiskinan yang berlarut-larut akibat salah urus pemerintahan masa lampau menjadi pemantik utama bagi sentimen ke-Riau-an yang didukung oleh beberapa tokoh intelektual dan pemuda, yang bahkan di antara mereka pernah menjadi pendukung Pemerintahan Orde Baru di masa lampau. Sentimen ini kemudian terefleksikan dengan munculnya wacana “Riau Merdeka”<sup>10</sup> meski dalam perkembangannya pendukung ide ini terfragmentasi menjadi kalangan moderat dan radikal, atau kalangan yang mementingkan esensi kemerdekaan dan mereka yang tetap bersikukuh mewacanakan kemerdekaan dalam konteks teritori.<sup>11</sup> Kasus Riau ini memang terlihat tanpa preseden. Namun, hal tersebut sejatinya bukanlah

sesuatu yang baru dalam persoalan nasionalisme dan kebangkitan etnis.

Sementara itu, munculnya wacana “Bali Merdeka” hanya beberapa waktu saja setelah reformasi bergulir menjadi sebuah fenomena yang mengejutkan. Meski kemudian hal itu lebih terlihat sebagai sebuah wacana kehadiran dan menguatnya wacana “Ajeg Bali” yang datang menyusul belakangan—yang mengimbau masyarakat untuk lebih memerhatikan dengan sungguh-sungguh arti ke-Bali-an—menjadi sebuah bukti hadirnya fenomena penguatan dan upaya kemandirian etnis di Bali. “Ajeg Bali” itu sendiri secara generik dapat diartikan sebagai upaya rekonstruksi identitas orang Bali berdasarkan formula adat, budaya, dan agamanya. Menurut I Nyoman Dharma Putra, dalam makna yang komprehensif “Ajeg Bali” memperlihatkan sebuah keinginan kuat Masyarakat Bali untuk mandiri, baik secara budaya maupun dalam batas tertentu politik. Dalam makna yang lain, konsepsi “Ajeg Bali” merupakan refleksi penolakan terhadap segenap upaya pendiktean atas segenap kebijakan dari pemerintahan pusat, yang dirasakan tidak sejalan dengan nilai-nilai ke-Bali-an.<sup>12</sup>

Narasi di atas memperlihatkan bahwa kebangkitan identitas keetnisan di era reformasi yang disuarakan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua merupakan fenomena konkret dari munculnya kesadaran dan gerakan politik atas dasar etnis. Bangkitnya sentimen etnis di beberapa daerah dalam batas-batas tertentu menunjukkan sebuah sikap *a priori* terhadap keindonesiaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kehadirannya jelas tidak monolitik. Munculnya keterwakilan politik semu, ketimpangan ekonomi, maupun pengakuan artifisial terhadap budaya lokal secara hipotetik telah menjadi faktor-faktor kunci bagi dikedepankannya kesamaan dan sentimen etnis di masyarakat Aceh, Riau, Bali, dan Papua. Sementara demokratisasi mungkin saja merupakan sebuah katalis bagi kemunculannya. Namun, ke semua hal itu harus tetap dilihat dan diuji secara jernih dengan tetap melihat persoalan ini secara lebih luas. Hal ini agar kita dapat menangkap akar permasalahannya secara objektif dan tepat.

<sup>9</sup> Sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia (60% kebutuhan minyak Indonesia dipenuhi oleh Riau), provinsi ini justru memiliki tingkat kemiskinan di atas 40%. Proses pemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar masyarakatnya telah memunculkan kekecewaan masyarakat Riau, mengingat SDA Riau yang demikian berlimpah yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat Riau. Tabrani Rab, “Merdeka atau Bergabung Negara Lain” dalam Digdo Juniarto, (Ed.), *Riau dalam Tiga Opsi: Otonomi, Federal atau Merdeka*, (Pekanbaru: ISDP, 2005), hlm. 133–138.

<sup>10</sup> Petikan Deklarasi Riau Merdeka. “Sudah lebih setengah abad kami menggantungkan hidup pada republik ini, selama itu pula minyak kami dijarah. Tak setitik pun menetes di tanah kami. Sungai dan tanah kami tak lagi memberi hidup karena polusi. Sudah lebih dari seperempat abad tanah kami dijarah sebagai konspirasi pusat dan konglomerat. Maka hari ini, kami putuskan untuk menentukan nasib kami sendiri. Kami telah mulai menukilkan sejarah kami dalam lembaran yang baru akan hak-hak kami, identitas dan tradisi kami dengan jalan damai. *We are beginning to think, we are writing a new chapter of history to demand our right, take on our duties, and defend our identity and our tradition, with peace.*” Pekan Baru 15 Maret 1999.

<sup>11</sup> Rudi Kurniawansyah, “Bergulir Wacana Otonomi Khusus bagi Riau”, *Media Indonesia*, 5 Mei 2006. Simak juga wawancara Radio Netherland Hilversum dengan Tabrani Rab 27 September 2004, dalam <http://www.cgi2you.com/members/message/mega/00122.shtml>.

<sup>12</sup> I Nyoman Dharma Putra, “Bali Pasca-Bom: Konflik, Kekerasan dan Rekonstruksi Identitas Budaya Seputar Ajeg Bali”, makalah dalam Kongres Kebudayaan V, 19–23 Oktober 2003, Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam [www.kongresbudpar.go.id](http://www.kongresbudpar.go.id)

## KEINDONESIAAN DAN IDENTITAS PRIMORDIAL

Kebangsaan dan keindonesiaan atau nasionalisme Indonesia sendiri merupakan sebuah konsep abstraktif yang kompleks. Konsep ini merupakan hasil sebuah sintesis yang memiliki pertautan kompleksitas akar-akar budaya dan historis yang demikian panjang dan sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan. Sejalan dengan pandangan Ernest Renan dan Rupert Emerson, perlu ditekankan aspek riil dan konkret dari sebuah nasion, baik dalam konteks eksistensi kolektivitas maupun teritori.<sup>13</sup> Dalam makna yang serba mencakup itulah penelitian ini memaknai keindonesiaan sebagai sebuah kompleksitas kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasannya. Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan. Dengan batasan ini terlihat sebuah peluang kajian dalam melihat keberadaan nasionalisme atau keindonesiaan, terutama dikaitkan dengan sebuah situasi ketika faktor kerelaan dan kesadaran untuk bersatu dalam sebuah nasion merupakan sesuatu yang dikonstruksikan oleh sebuah komitmen di sebuah zaman

Sementara di lain pihak, kelompok etnik pada dasarnya merupakan bagian dalam kelompok primordial, yang menurut Clifford Geertz hadir sebagai sesuatu yang dipandang *given* sebagai hasil dari konstruksi sosial yang cukup lama. Menurut Fred W. Riggs, komunitas etnik adalah sebuah *ascriptive criteria* yang membedakan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.<sup>14</sup> Sementara menurut beberapa kalangan etnisitas adalah sebuah *pertalian*

*primordial* dalam makna sesuatu yang terkait dengan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang, secara tradisional ada di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang terus-menerus hadir di masa lampau hingga saat ini, dan sebagai sesuatu kesadaran kolektif.<sup>15</sup>

Namun, dalam perkembangannya persoalan etnisitas secara teoretis tidak sesederhana itu. Pada laporan penelitian tentang “Nasionalisme dan Etnisitas”, Muridan S. Widjojo telah menekankan betapa rumitnya hakikat keetnikan atau etnisitas itu.<sup>16</sup> Secara umum digambarkan ada tiga pemaknaan etnisitas. *Pertama*, pemaknaan yang berhubungan dengan hakikat primordialisme. Dalam konteks ini, etnisitas terkait dengan persoalan abstrak, seperti kekerabatan, intensitas solidaritas yang mengemuka oleh kekuatan koersif, dan oleh emosi-emosi dan sentimen-sentimen sakral yang menyatukan. *Kedua*, pemaknaan etnisitas dalam paradigma sosio-biologis. Aliran ini melihat etnisitas sebagai suatu unsur fakta yang utuh dan universal dari perilaku manusia, partisipasi terbatas di dalam kelompok dilihat sebagai *etant en soi* yang berharga, tekanan diletakkan pada kekerabatan sebagai matriks (inti) dasar tempat etnisitas berakar. Mirip dengan kaum instrumentalis, etnisitas dipandang sebagai representasi suatu bentuk kerjasama yang berfungsi memaksimalkan kepentingan individu. Jadi suatu etnis dipandang sebagai kelompok individu yang berjuang meningkatkan diri dan perbaikan nasib secara kelompok serta memiliki bahasa dan budaya yang sama. Etnisitas dianggap sebagai tatanan ‘genetis’. *Ketiga*, terkait dengan pemenuhan kebutuhan material atau sebagai ekspresi kepentingan bersama. Dengan menggunakan pendekatan instrumentalis dan mobilisasionis, dapat dirangkum tiga motif dibalik eksistensi keetnikan, yakni sebagai upaya instrumentalis memperoleh dan mempertahankan pengaruh dan aksesibilitas dalam konteks politik

<sup>13</sup> Batasan inilah yang membedakan pula antara nasion dengan nasionalisme versi Anderson yang masih bersifat imajinatif ketimbang sebagai sesuatu yang kongkrit. Nasion adalah sebuah hal yang sudah terjadi dan nyata, yang atas dasar itu pula wilayah politik sebuah nasion dapat ditetapkan.

<sup>14</sup> Fred W. Riggs, “Turmoil among Nations, A Conceptual Essay: Ethnonationalism, Authoritarianism, Anarchy, and Democracy”, Paper Prepared for Use at the International Studies Association Conference, Chicago, February 22–25, hlm. 2, 18, 22 dalam Edwin Martua Bangun Tambunan, *Nasionalisme Etnik, Kashmir dan Quebec*, (Semarang: Intra Pustaka Utama), hlm. 10.

<sup>15</sup> Lihat misalnya batasan dari Walker Connor, “Beyond Reason: The Nature of Ethnonational Bond”, dalam “Ethnic and Racial Studies” 16 (3), 373-89, dalam Donald L. Howoritz, “Structure and Strategy in Ethnic Conflict: A Few Steps toward Synthesis”, dalam R. William Liddle, (Ed.), *Crafting Indonesian Democracy*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 181.

<sup>16</sup> Muridan S Widjojo, “Nasionalisme dan Etnisitas”, dalam Firman Noor, (Ed.), “Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme”, (Jakarta: Puslit Politik LIPI, 2007).

dan ekonomi, sebagai sebuah pilihan rasional untuk mendapatkan kesejahteraan material, serta sebagai mekanisme solidaritas kaum teralienasi dalam rangka melawan hegemoni dan represi kelompok penguasa mayoritas. Dari beragam sudut pandang itu, batasan yang melingkupi tiga pemaknaan di atas merupakan definsi kerja dari penelitian ini, dalam memaknai hakikat keetnisan.

Nasionalisme dan etnisitas sebenarnya adalah konsep yang berkerabat dan mayoritas nasionalisme berkarakter etnis. Perbedaan antara nasionalis dan etnisitas sebagai suatu konsep analitis yang sederhana saja, jika kita berpegang pada tataran formal definisi. Suatu ideologi nasionalis adalah juga ideologi etnis yang membutuhkan negara atas nama suatu kelompok etnis. Hanya saja dengan mengutip pandangan Erikson, dalam praktik perbedaan antara keduanya sangatlah problematik.<sup>17</sup>

Hal ini karena *pertama*, nasionalisme kadang-kadang bisa saja mengekspresikan suatu ideologi supra-etnis atau poli-etnis yang lebih menekankan hak-hak sipil daripada akar budaya yang sama. Ini banyak berlaku di negara-negara Afrika, seperti Mauritius di mana tidak ada satu kelompok etnis yang secara terbuka mencoba membelokkan *nation-building* ke dalam suatu proyek etnis. Nasionalisme Indonesia juga dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini. *Kedua*, kategori tertentu masyarakat mungkin melihat dirinya di zona abu-abu antara bangsa dan kategori etnis. Jika beberapa dari anggota mereka menuntut kemerdekaan politik penuh, sementara yang lainnya membatasi tuntutan mereka pada bahasa dan hak-hak lainnya di dalam negara yang sudah ada.

## KEBANGKITAN SENTIMEN KEETNISAN

Dalam konteks negara-bangsa yang baru muncul, Geertz berkeyakinan bahwa peluang untuk menguatnya sentimen keetnisan tetap besar sering dengan tetap besarnya peluang menguatnya sentimen primordial. Hal ini terkait dengan persoalan turut sertanya segenap elemen masyarakat ke dalam sebuah negara baru. Namun, dalam perkembangannya beberapa faktor turut berperan dalam memunculkan sentimen etnis. Hal ini terutama terkait jika kemudian

<sup>17</sup> Thomas Hylland, *Ethnicity and Nationalism* (London, Chicago, Illinois: Pluto Press, 1993).

pemerintahan yang menggantikan penguasa kolonial sengaja menciptakan kebijakan yang bersifat tidak proporsional.<sup>18</sup> Terkait dengan kebangkitan sentimen etnis menurut Joseph Rothscild terdapat dua alasan mengapa sebuah kelompok etnis yang semula berkehendak membentuk bangsa kemudian dalam perjalannya menjadi kehilangan orientasi nasionalismenya. *Pertama*, hal itu disebabkan adanya kompetisi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak imbang, yang kemudian mendorong menguatnya identitas suatu kelompok etnis. *Kedua*, adanya aktor yang menggerakkan anggota kelompok etnis sehingga memiliki sentimen keetnisan, yang kemudian mengarah pada pembentukan sebuah bangsa yang mandiri.<sup>19</sup>

Penyebab pertama yang juga merupakan inti dari suatu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan kontekstual dalam memahami nasionalisme, meyakini bahwa menguatnya sentimen keetnisan terkait dengan sebuah situasi ketidakadilan di berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik, sosial dan budaya yang dihadapi oleh sebuah kelompok etnis, baik berupa pengabaian, eksplorasi, dominasi, represi, atau diskriminasi.<sup>20</sup> Terkait dengan persoalan ketidakadilan ini, terdapat tiga teori yang berupaya menjelaskannya.<sup>21</sup> Teori pertama yang disebut sebagai *revised modernization* menjelaskan bahwa perubahan distribusi sumber daya, urbanisasi, dan industrialisasi di suatu negara mendorong meningkatnya kompetisi antaranggota masyarakat. Dalam kompetisi ini kelompok yang memiliki modal, pendidikan dan keahlian yang terbatas akan tersingkir. Kalangan yang tersingkir ini kemudian merasa teralienasi dan memadang tidak tepat lagi, jika mereka tetap mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari sistem politik yang ada. Sebagai kompensasi dari hal itu kelompok tersingkir ini mencari identifikasi baru dengan merujuk simbol-simbol lain, di mana simbol yang terdekat, akrab atau mudah ditemukan adalah unsur-unsur etnisitas.

Sementara itu, teori kedua adalah kolonialisasi internal. Dalam sudut pandang ini adanya ketidakadilan menyebabkan kalangan

<sup>18</sup> Geertz, *Op.Cit*, hlm. 269–277.

<sup>19</sup> Joseph Rothscild, “Ethnopolitics: A Conceptual Framework”, (New York: Columbia University Press), hlm. 29, dalam Tambunan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5–7.

yang kalah itu kemudian berkeinginan untuk melepaskan diri dari struktur negara yang ada. Hal ini dipicu oleh perasaan inferior suatu kelompok etnis yang memandang dirinya sebagai korban penindasan dan eksploitasi dari sistem pemerintahan yang ada atau kelompok-kelompok etnis lainnya. Adapun teori ketiga adalah *relative deprivation* yang dikembangkan oleh Robert Gurr. Dalam sudut pandang ini adanya kesenjangan antara cita-cita dan fakta menyebabkan munculnya rasa frustrasi sebuah kelompok etnis. Gurr menyatakan apabila meningkatnya sebuah harapan tidak dibarengi oleh kapabilitas untuk memperolehnya dapat menyebabkan sebuah ketidakpuasan, jika kemudian mengalami politisasi akan melahirkan gerakan sosial yang mengarah pada upaya disintegratif.<sup>22</sup>

Secara umum, sudut pandang kontekstual yang menekankan ketidakadilan sebagai alasan utama dapat menjelaskan faktor-faktor struktural dibalik kebangkitan rasa keetnisan. Namun, cara pandang ini tidak mampu menjelaskan dengan memuaskan penyebab mengapa sebuah kelompok yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan tidak terpicu rasa keetnisan atau bahkan kebangsaannya. Di sinilah kemudian sudut pandangan konstruktif yang berkeyakinan adanya sebuah rekayasa elite dalam mengeksplorasi sentimen keetnisan, sebagai faktor kedua dalam memunculkan semangat etnis, menemukan relevansinya.

## NASIONALISME DI EMPAT DAERAH PENELITIAN

### Aceh

Relasi Aceh dengan Indonesia pernah menempati memori kolektif negatif dalam mayoritas pikiran dan hati orang Aceh. Menelisik kronik mengenai Aceh, ingatan positif mengenai Indonesia yang direkam oleh orang Aceh terletak pada periode revolusi kemerdekaan yang memunculkan “*shared feelings*” melawan penjajah. Tetapi, ingatan positif itu diputus oleh sejarah panjang kekerasan. Upaya awal untuk memutus rantai kekerasan di Aceh dimungkinkan setelah kejatuhan Soeharto, terutama di masa

<sup>23</sup> Robert Gurr, “Why Men Rebel” (New Jersey: Princeton University Press), hlm. 12–13, dalam *Ibid.*, hlm. 7.

administrasi Presiden Habibie, yang memperlihatkan perubahan paradigma pusat terhadap daerah.<sup>23</sup> Maka, setelah melalui tahapan yang cukup panjang, proses perdamaian yang difasilitasi oleh Center Management Initiative (CMI) di Helsinki pada bulan Agustus 2005 merupakan “obat” yang diharapkan dapat memulihkan keterputusan dari ingatan positif orang Aceh terhadap Indonesia.

MoU Helsinki yang diturunkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11/tahun 2006 dalam pasal-pasalnya menjamin hak-hak orang Aceh untuk mendapatkan keadilan dari sisi ekspresi kultural, ekonomi dan politik. Banyak pihak mengharapkan situasi damai ini berlangsung secara *mutual* sehingga perilaku kekerasan tidak lagi mendapat tempat. Dengan ini, MoU Helsinki juga merupakan basis bagi perubahan dalam orientasi kelompok masyarakat Aceh yang tadinya menuntut pemisahan diri sehingga tidak lagi memandang dirinya sebagai suatu kekuatan bersenjata.

Dengan memahami latar belakang kontekstual di Aceh, perspektif untuk melihat nasionalisme di Aceh yang saat ini tengah “menghirup udara perdamaian” adalah dalam kerangka melihat negosiasi antara keacehan dan keindonesiaan. Wujud dari proses negosiasi itu adalah dua penanda politik yang berlangsung di tingkat lokal, yaitu pemilihan kepala daerah di tahun 2006 dari calon independen, yang merupakan bagian dari komitmen MoU Helsinki; serta pemilu lokal di tahun 2009 yang diikuti oleh partai-partai lokal. Bagi orang Aceh, kekuasaan politik lokal yang dijalankan melalui pemilu Orde Baru tidak dapat menjawab ketidakberdayaan politik dan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, partai lokal justru dianggap lebih mampu menjawab tantangan perubahan di Aceh pasca-MoU apalagi semua rakyat Aceh telah berkomitmen untuk menjalankan agenda perdamaian.

Calon independen dan partai lokal adalah dua fenomena politik pertama di Indonesia sejak reformasi. Pemilu lokal untuk memilih Gubernur Aceh dan wakilnya pada bulan Desember 2006, berlawanan dengan *skeptisme* banyak pihak, berlangsung dalam suasana yang damai. Namun,

<sup>23</sup> Lihat, Rizal Sukma, “Aceh in post-Suharto Indonesia. Protracted conflict amidst democratization”, dalam Damien Kingsbury dan Hary Aveling, (Eds.), *Autonomy and Disintegration in Indonesia*, (London and New York: Routledge Curzon, 2003), hlm. 149.

fenomena lokal, antara lain pengaduan-pengaduan mengenai intimidasi dan/atau kasus-kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu setelah berlangsungnya Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Aceh di tahun 2006 menunjukkan kecenderungan penguatan politik identitas. Pemilu lokal yang diyakini diwarnai oleh "politik ingatan" yang menguraikan kepedihan masa lalu, di mana politik identitas yang terbelah-pecah dalam berbagai kelompok menemukan tempatnya. Meskipun demikian, dalam konteks perdamaian yang saat ini berlangsung, agaknya realitas sehari-hari di mana rakyat Aceh tengah menikmati hidup dalam keadaan damai serta mampu menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari nasional yang beradab dan berdaulat, agaknya terlalu mahal biaya yang harus dikeluarkan jika kekerasan berbasiskan identitas terjadi lagi.

### Papua

Situasi yang berbeda ditunjukkan oleh temuan lapangan di Papua yang sejauh ini belum mengarah pada gerakan etnonasionalisme yang secara politik dan ekonomi mampu secara signifikan mengancam keutuhan dan integritas Republik Indonesia (RI). Etnonasionalisme Papua sebagai wacana dan tuntutan pemisahan diri memang sempat menguat beberapa tahun setelah Soeharto jatuh pada 1998, namun melemah sejak pembunuhan Theys Eluay pada 2001. Selain kelemahan internal di dalam Gerakan Papua Merdeka, keberhasilan sistem politik elektoral, terutama Pilkada, papuanisasi di lingkungan birokrasi, dan menguatnya upaya penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, memengaruhi penguatan integrasi nasional dalam bentuk peningkatan partisipasi orang asli Papua ke dalam sistem politik dan kepercayaan publik secara terbatas pada sistem hukum RI. Namun, kualitas integrasi, praktik demokrasi yang substansial dan pembangunan manusia masih terhalang oleh berbagai persoalan mendasar dari masa lalu yang belum diselesaikan untuk membangun hubungan politik Jakarta-Papua yang lebih adil, konstruktif, dan demokratis.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa fondasi kesadaran dan identitas Papua secara sistematis dikonstruksi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Upaya konstruksi ini dilakukan dengan memanfaatkan faktor perbedaan ras dan budaya yang digunakan sebagai wacana formal. Proses

menjadi Papua bagi orang-orang asli Papua yang membedakannya dengan orang Indonesia diperkuat oleh tindakan Pemerintah Indonesia sejak Indonesia menguasai Papua pada 1963, yang dimulai dengan pengalaman sejarah integrasi Papua yang dianggap cacat legitimasi, diperparah dengan marginalisasi orang asli, dan proses pembangunan yang meninggalkan dan menimbulkan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua, dan diperburuk dengan catatan kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Jadi, identitas Papua digunakan sebagai pembeda, instrumen, sekaligus representasi berbagai persoalan konkret yang semakin kompleks dari sejak zaman kolonial hingga sekarang ini.

OPM dan berbagai variannya di Papua sebagai gerakan politik yang berumur 40 tahun memang tidak berkembang. Ideologi mesianistik (Ratu Adil) masih dominan. Keberhasilan perjuangan, pada tingkat akar rumput, dipahami sebagai penantian sang Mesias. Dalam konteks OPM, menurut Brian May, disandarkan pada sang *Arbiter of Justice, the Omnipotent Power of Powers*, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai gerakan bersenjata OPM juga stagnan. Penguatan persenjataan tampaknya tidak mampu dilakukan untuk memperkuat Tentara Pembebasan Nasional (TPN). Meskipun dalam penguasaan medan gerilya, seperti hutan-hutan Pegunungan Tengah mereka lebih unggul daripada TNI, kemampuan tempurnya melawan TNI, mungkin akibat minimnya persenjataan, sangatlah terbatas. Selain itu, tidak terlihat adanya upaya untuk mengirimkan kader mudanya untuk berlatih perang gerilya di luar negeri untuk memperkuat kemampuan strategi dan komando peperangan.

Para nasionalis Indonesia perlu mengubah total perspektifnya dalam melihat Papua. Pemerintah Indonesia, mulai dari pusat hingga kabupaten, bisa keluar dari paranoيا simbolis dan secara realistik memahami persoalan Papua secara otokritis. Kalau sudah mampu membebaskan diri dari penjara simbolisme, Indonesia harus secara menyeluruh mengubah paradigma dan pendekatan. Tuntutan orang Papua seharusnya dijawab dengan mengubah pendekatan dan cara pemerintah dalam menangani masalah Papua dari paradigma keamanan ke perspektif keadilan. Dari perspektif nasionalis yang simbolistik dan militeristik menjadi perspektif yang substansial dan konkret. Dengan kata lain, nilai keindonesiaan di Papua

harus dibangun dengan kebijakan konkret langsung menyentuh akar persoalan yang nyata. Nasionalisme Indonesia orang Papua bisa dibangun melalui perbaikan kebijakan yang hasilnya secara konkret dapat dinikmati oleh orang asli Papua.

### Bali

Masalah identitas keetnisan di Bali periodesasinya bisa dipilah dalam konteks waktu sebelum dan setelah serangan bom Bali. Kasus sebelum bom Bali yang menonjol adalah wacana Bali Merdeka bulan Oktober 1998, saat umat Hindu Bali tersinggung terhadap ungkapan seorang menteri dari PPP yang menghina Megawati Soekarno Putri. Setelah bom Bali kasus nasionalisme dan politik identitas yang menonjol adalah aksi penolakan komunitas Bali terhadap RUU Pornografi dan Pornoaksi yang dirancang di DPR RI sebagai bentuk penyeragaman dan antikeberagaman, kontroversi KIPEM yang menimbulkan ekses pungutan liar dan ekonomi biaya tinggi bagi para pendatang, bakso Jawa versus bakso Bali, dan semangat *Ajeg Bali*, serta *Jagaditha* yang menebarkan kearifan lokal untuk memelihara lingkungan, warisan budaya, dan persaudaraan umat manusia sebumi.

Ada beberapa faktor-faktor lokal dan nasional, terutama kebijakan pemerintah pusat soal Otonomi Daerah (Otda) di Dati II yang memainkan peran untuk meningkatkan sentimen tuntutan Otonomi Khusus (Otsus) para cendekiawan Bali. Berbeda dengan tuntutan Otsus di daerah lain (NAD, Papua, Riau) yang menginginkan antara lain dibolehkannya partai lokal, pembagian persentase pusat daerah yang lebih signifikan, Gubernur harus putra daerah, tuntutan Otsus Bali menginginkan agar titik berat otonomi pemerintahan dan pengelolaan keuangan agar dikembalikan ke provinsi. Dasar pemikirannya agar daerah kabupaten di Bali yang PAD-nya kecil (Klungkung, Negara, Buleleng) mendapatkan subsidi silang dari kabupaten yang PAD-nya besar (Badung, Denpasar) lewat Dati I.

Seberapa besar dan hingga tahap mana upaya kebangkitan etnisitas itu diwujudkan di Bali, berdasarkan temuan di lapangan cenderung ada dalam skala kecil, lokal, tuntutan simbolik, dan kembali ke model otonomi daerah yang lama di Dati I. Wacana Bali Merdeka bukanlah gerakan terstruktur dan sistemik lewat kekuatan bersenjata

untuk lepas dari pusat. Ia merupakan aksi sosial berupa “tuntutan kemerdekaan simbolik”, ekspresi kemarahan, dan bagian dari posisi tawar antara Bali dan Jakarta. Pesannya agar elite nasional tidak perlu mengaitkan kehidupan beragama dan jatuh-menjatuhkan dalam persaingan politik untuk posisi legislatif atau eksekutif nasional. Pesannya agar RUU Pornografi dan Pornoaksi juga memerhatikan keunikan budaya dan perekonomian Bali yang berbasis Hindu dan pariwisata. Pertarungan nasib pedagang bakso Jawa di Klungkung terhadap pedagang bakso dari Koperasi Krama Bali lewat *awig-awig* yang mengimbau orang Bali jangan membeli bakso “orang lain” merupakan kebangkitan etnisitas yang salah kaprah. LSM lokal, seperti Manikaya Kauci dan para cendekiawan kampus juga menyayangkan kalau masalah pedagang bakso asal Jawa terdiskriminasi dan hilang mata pencahariannya lantaran *awig-awig* yang cenderung berlawanan terhadap semangat kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika di Bali dan di Indonesia.

### Riau

Secara khusus, bangkitnya sentimen keetnisan di Riau terutama dipicu oleh salah urus pemerintah pusat selama bertahun-tahun yang kemudian memunculkan sebuah fenomena yang layak disebut sebagai “kolonialisme internal”. Di sini pemerintah pusat, terutama pada masa Orde Baru, yang berkuasa secara sentralistik dan otoriter menjadi “institusi legal” yang tidak saja mengisap secara ekonomi, namun pula melakukan represi politik dan peminggiran hak-hak sosial-budaya rakyat Riau secara sistematis.

Dalam konteks ekonomi, kolonialisme internal terasakan terkait dengan munculnya fenomena ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan minimnya tingkat kesejahteraan rakyat Riau. Puncaknya adalah ketika Riau selama beberapa tahun menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, meskipun dalam waktu yang bersamaan memproduksi hampir satu juta barel minyak bumi per hari. Fenomena kemiskinan absolut yang dialami suku Sakai di ladang-ladang minyak merupakan gambaran sederhana tentang ketimpangan yang dialami oleh masyarakat Riau tersebut. Perlu pula dipahami bahwa eksploitasi SDA (atau tepatnya perampasan hak-hak ekonomi) yang berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Riau

berlangsung dengan melibatkan kalangan swasta yang juga tidak menaruh perhatian terhadap nasib rakyat Riau.

Sementara dalam konteks politik, kolonialisme itu mewujud dalam sebuah represi yang secara kontinu merampas hak-hak politik rakyat Riau. Represi itu berdampak terutama pada kegagalan sistemik terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang aspiratif. Hal ini berlangsung tatkala pemerintah Orde Baru berkepentingan agar aspirasi pusat lebih terakomodasi sehingga proses eksploitasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan pusat dapat terus berlangsung. Penolakan Presiden Soeharto atas hasil pemilihan Gubernur Riau di tahun 1985, yang memenangkan seorang putra daerah, menjadi sebuah monumen yang selalu diingat atas sikap otoriter Orde Baru yang telah mengingkari kehendak mayoritas rakyat Riau.

Sementara dalam konteks pembinggiran hak sosial-budaya rakyat Riau, terlihat dari termarginalisasi rakyat Riau, terutama suku asli, akibat eksplotasi alam yang tidak mengindahkan aspek-aspek sosial dan adat di dalamnya. Akibatnya, sebagai anak bangsa yang memiliki warisan dan hak-hak budaya yang khas, rakyat Riau mengalami pembinasaan budaya (atau dalam bahasa Tabrani Rab disebut *ethnic cleansing*) dalam skala yang massif. Dapat dikatakan inilah bentuk penjajahan kultural yang secara fundamental telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dalam upaya meraih kembali kedaulatan ekonomi, politik, maupun adat inilah rasionalitas kemerdekaan dikumandangkan oleh para penggiatnya dan terekspresikan pada pendeklarasian kedaulatan Riau pada 1999 dan pilihan opsi merdeka pada Kongres Rakyat Riau II tahun 2000.

Sementara itu, dalam melihat aspek keetnisan yang diusungnya terjadi sebuah fenomena ekstensifikasi dan instrumetalisme. Dalam memandang dirinya sebagai sebuah entitas keetnisan, menjadi orang Riau tidak lagi berarti menjadi orang Melayu. Makna “orang Riau” telah mengalami ekstensifikasi meliputi siapa saja yang ada di wilayah Riau dan ditafsirkan secara instrumentalis sebagai menjadi orang yang belum merdeka atau tertindas akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil. Atas dasar itulah dapat dipahami jika kesadaran

menjadi orang Riau-pun tidak hanya dimiliki semata oleh orang Melayu.

Sementara imbuhan “orang yang dizalimi” dalam mengartikan “orang Riau” mencuatkan sebuah aspirasi untuk berdaulat atau merdeka, sebagai sebuah tuntutan atas sesuatu yang dulu pernah dimiliki. Dalam makna yang paling formalistik makna merdeka itu dipahami sebagai upaya menjadi merdeka dengan tidak saja mendapatkan hak untuk mengatur seluruh kepentingannya secara independen, namun kemerdekaan secara geografis.

Namun, dalam perkembangannya tuntutan merdeka tidak pernah mencuat menjadi sebuah gerakan separatis yang sistematis. Merdeka pun menjadi bersifat substansialis atau bahkan simbolis saja. Hal ini karena dalam konteks paradigma keinginan merdeka hanya salah satu opsi saja dari beragamnya penafsiran dan munculnya varian dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat Riau. Varian tersebut secara garis besar mengerucut ke dalam tiga pandangan, yakni otonomi khusus dalam naungan Republik Indonesia, menjadi bagian negara federal, dan merdeka. Saat ini opsi merdeka pun semakin kehilangan momentum terutama terkait dengan preseden sejarah, kondisi Riau kontemporer yang makin membaik dan optimisme perbaikan kehidupan dalam naungan Indonesia yang semakin demokratis di masa yang akan datang.

Menyurutnya ide merdeka sejalan pula dengan semakin melemahnya gerakan Riau merdeka, yang memang tidak pernah hadir secara sistematis sejak awal kelahirannya. Lebih dari itu lemahnya kepemimpinan dan tidak solidnya organisasi penggerak kemerdekaan menjadi penyebab lainnya, di samping kurangnya dukungan yang penuh dari seluruh rakyat akibat simpul-simpul atau jaringan yang kurang terbangun. Dalam hal ini “agenzi” atau aktor yang dibayangkan Gurr sebagai instrumen pengartikulasian kemerdekaan tidak pernah benar-benar mewujud di tanah Riau. Dan absennya “*vanguard party*” dalam episode Riau di awal reformasi inilah yang pada akhirnya turut meredupkan aspirasi kemerdekaan yang sesungguhnya.

Fenomena maraknya berbagai festival kebudayaan, meluasnya penggunaan istilah melayu dan tulisan arab-melayu, meningginya hak tawar rakyat Riau dalam dunia usaha, terpilihnya dua kali berturut-turut putra daerah sebagai Gubernur Riau, maupun semakin

diperhatikannya hak-hak adat dan sosial penduduk asli Riau oleh pemerintah pusat maupun swasta, menjadi beberapa capaian yang relatif dapat terlihat di Riau saat ini. Disinilah eksklusifisme makin terasakan dan memperlihatkan jati dirinya.

Namun, hal ini tidak berarti makna keindonesiaan dapat dengan mudah dipertahankan di tanah Riau. Sebagai sebuah kata yang pernah disandingkan dengan “Pusat”, “Jakarta” atau “Negara Kesatuan-Sentralistik” yang berarti penindasan dan penjajahan, keindonesiaan perlu ditampilkan dengan wajah yang semakin demokratis, beradab dan adil. Jika hal itu tidak juga mewujud, maka akan muncul sebuah bentuk negara-bangsa yang memiliki jasad teritorial namun tanpa ruh kebangsaan. Sebab meski upaya merdeka secara teritorial mungkin sulit terjadi, semangat partikularisme yang tengah membumbung di tanah Riau—meski masih sebatas simbolis—jelas dapat menjadi ancaman bagi hakikat keindonesiaan yang menyarangkan semangat pluralisme itu. Indonesia ke depan memerlukan dialog persuasif, spiritualisme, dan pemajuan budaya kemajuan yang ditopang oleh dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan bersama semua anak negeri. Tidak ada nasionalisme tanpa pemerataan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Cliford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gurr, Robert. 1992. *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hylland, Thomas. 1993. *Ethnicity and Nationalism*. London, Chicago, Illinois: Pluto Press.
- Hurgronje, Snouck. 1906. *The Atjehers*. Leiden: E.J. Brill.
- JA, Denny. 2003. “Membelah Politik Papua”, dalam *SP Daily*, 2 September 2003.
- James, Paul. 2007. “Theorizing Nation Formation in the Context of Imperialism and Globalism”, dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar, *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*. London: Sage Publications.
- Kingsbury, Damien and Aveling, Harry (Eds.). 2003. *Autonomy and Disintegration in Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon.
- Kurniawansyah, Rudi. 2006. “Bergulir Wacana Otonomi Khusus bagi Riau”, dalam *Media Indonesia*, 5 Mei 2006.
- Kell, Tim. 1995. *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992*. Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project.
- Liddle, R. William (Ed.). 2001. *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Mizan.
- Putra, I Nyoman Darma. 2001. “Bali Pasca-Bom: Konflik, Kekerasan dan Rekonstruksi Identitas Budaya Seputar Ajeg Bali”. Makalah dalam Kongres Kebudayaan V, 19-23 Oktober 2001, Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam [www.kongresbudpar.go.id](http://www.kongresbudpar.go.id).
- Rab, Tabrani. 2005. “Merdeka atau Bergabung Negara Lain”. dalam Digdo Juniarto, ed. *Riau dalam Tiga Opsi: Otonomi, Federal atau Merdeka*. Pekanbaru: ISDP.
- Reid, Anthony (Ed.). 2006. *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press.
- Rothscild, Joseph. 1993. “Ethnopolitics: A Conceptual Framework”. New York: Columbia University Press.
- Tambunan, Edwin Martua Bangun. 2002. *Nasionalisme Etnik, Kashmir dan Quebec*. Semarang: Intra Pustaka Utama.
- Widjojo, Muridan S. 2007. “Nasionalisme dan Etnisitas”, dalam Firman Noor, (Ed.). “Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme”. Jakarta: Puslit Politik LIPI, <http://www.cgi2you.com/members/message/mega/00122.shtml>.